

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada setiap kontestasi pemilihan daerah, umumnya memerlukan dukungan dari relawan atau kelompok tertentu, seperti organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pastinya masyarakat untuk mendapatkan dukungan dalam memenangkan kontestasi pemilihan, serta kelompok yang memiliki kepentingan lainnya. Kelompok-kelompok yang memberikan dukungan tentunya bukan hanya berperan dalam mengumpulkan suara, tetapi juga membantu untuk membangun legitimasi dan kredibilitas kandidat calon dimata masyarakat.<sup>1</sup>

Setiap daerah di Indonesia memiliki cara pandang yang berbeda dalam menentukan pilihannya pada kontestasi pemilihan daerah, seperti halnya di Sumatera Barat yang memiliki 19 kabupaten/kota yang mayoritas sukunya adalah Suku Minang. Sumatera Barat memiliki banyak organisasi masyarakat, LSM, serta beberapa pemangku adat lainnya yang biasanya berpartisipasi dengan memberikan dukungannya kepada calon kepala daerah yang akan ikut dalam kontestasi pemilihan daerah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Amiruddin, A. 2022. Peran Komunitas Dalam Pemenangan Pemilukada. *Arajang : Jurnal Ilmu Sosial Politik*. 5(2) 119-137.

<sup>2</sup>Sarbaini. 2020. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum* 12(1) 107-136.

Banyaknya organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia yang bisa menjadi sebagai suatu kelompok kepentingan yang bisa menyuarakan suara rakyat kepada para pemangku jabatan di pemerintah. Peran ormas di sinipun, baik bagi individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan di dalam pemilihan kepala daerah ini, biasanya menjelang pemilihan kepala daerah berlangsung, organisasi masyarakat ini menjadi organisasi yang digunakan para calon kepala daerah untuk mendapatkan dukungan politik.<sup>3</sup> Sama halnya di Sumatera Barat yang banyak memiliki organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan, seperti Muhammadiyah, Nadhaltul Ulama, Warga Padang Cinta Damai (WPCD), Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), dan masih banyak ormas lainnya.

Dari beberapa ormas di atas, pada dasarnya ikut terlibat dalam pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat, dengan memberikan dukungannya dalam bentuk apapun sebagai presentasi dari masyarakat kepada calon kepala daerah yang didukungnya. Begitu juga dengan Muhammadiyah di setiap pemilihan selalu dimintai dukungannya oleh calon kepala daerah dengan menerbitkan surat rekomendasi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar sebagai bentuk dukungan yang diberikan kepada calon kepala daerah tersebut.<sup>4</sup> Namun rekomendasi yang diberikan Muhammadiyah kepada calon kepala daerah ini, masih banyak menimbulkan perdebatan mengenai posisi Muhammadiyah yang

---

<sup>3</sup>PI Prameswari. 2015. Studi Kasus Tentang Organisasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Bali 2013. *Jurnal Politik Muda* 4(1) 137-143.

<sup>4</sup>umsb.ac.id, Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar Dalam Politik, <https://umsb.ac.id/berita/index/1631-pergeseran-nilai-Muhammadiyah-sumbar-dalam-politik> Diakses pada 24 Januari 2025.

seharusnya menjaga netralitas sebagai ormas Islam di Indonesia. Keterlibatan Muhammadiyah baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan dilema internal tentang posisi Muhammadiyah, namun dalam hal ini Muhammadiyah berperan ganda sebagai kelompok kepentingan yang juga menyalurkan aspirasi, dan sekaligus harus menjaga netralitasnya sebagai ormas di mata publik, khususnya dalam konteks sosial-politik Indonesia yang plural.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat secara resmi memberikan 14 rekomendasi dukungan kepada pasangan calon daerah untuk maju dalam Pilkada 27 November 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak sekedar menjadi ormas Islam, melainkan juga memiliki kepentingan serta pengaruh dalam pemilihan kepala daerah di Sumbar.<sup>5</sup> Pemberian 14 rekomendasi pasangan calon tersebut memperlihatkan kompleksitas perpolitikan di Sumatera Barat, yang mana Muhammadiyah mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari kapabilitas, rekam jejak, sampai kepada bentuk atau wadah yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon.

Surat rekomendasi resmi pasangan calon kepala daerah yang diberikan oleh Muhammadiyah di beberapa kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Sinjungjung (Benny Dwifa Yuswir dan Iraddatillah), Kabupaten Tanah Datar (Eka Putra dan Ahmad Fadly), Kabupaten Agam (Guspari Gaus dan Yogi

---

<sup>5</sup>menaramu.id, LHKP PWM Sumatera Barat Rekomendasikan 14 Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Berikut Daftarnya, <https://www.menaramu.id/2024/10/lhkp-pwm-sumatera-barat-rekomendasikan-14-calon-kepala-daerah-untuk-Pilkada-2024-berikut-daftaranya/> Diakses pada 24 Januari 2025.

Yolanda), Kabupaten Pasaman (Mara Ondak dan Desrizal), Kota Padang (Hendri Septa dan Hidayat), Kota Pariaman (Genius Umar dan M. Ridwan), Kota Solok (Ramadhani Kirana Putra dan Suryadi Nurdal), Pasaman Barat (Yulianto dan Ihpan), Padang Panjang (Nasrul Naga dan Eri), Kota Bukittinggi (M. Ramlan Nurmatias dan Ibnu Asis), Kota Payakumbuh (Almaysar dan Joni Hendri), Kabupaten Pesisir Selatan (Hendrajoni dan Risnaldi Ibrahim), Kabupaten Limapuluh Kota (Deni Asra dan Riko Febrianto), dan Dharmasraya (Annisa dan Leli Resmi) dari 14 pasangan calon yang diberikan dukungan oleh Muhammadiyah, hasil rekomendasi pada Pilkada serentak menunjukkan 7 pasangan calon yang direkomendasikan berhasil terpilih dan 7 pasangan calon lainnya gagal dalam kontestasi pemilihan kepala daerah tersebut.<sup>6</sup>

Surat rekomendasi yang diberikan Muhammadiyah merupakan bentuk dukungan serta keterlibatannya dalam pemilihan, selain itu Muhammadiyah juga memiliki peran yang cukup signifikan, sehingga memiliki pengaruh kepada pemilihan calon kepala daerah melalui pengarahan basis massa Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota untuk memilih calon kepala daerah yang direkomendasikan oleh Pimpinan Muhammadiyah Wilayah (PMW) Sumbar.<sup>7</sup> Walaupun bentuk peran politik Muhammadiyah melalui upaya komunikasi-komunikasi politik yang dilakukan oleh para elit untuk mendukung calon kepala daerah, namun tidak semua massa Muhammadiyah menerima

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>C.D Edwinarta, Dwijayanti. R. 2018. Komunikasi Politik Elit NU dan Muhammadiyah dalam Pilkada Kediri. *Jurnal Kajian Media* 2(1) 20-29.

politik praktis yang dilakukan para elit itu sendiri dan masih banyak juga perbedaan pendapat dari berbagai kalangan di Muhammadiyah itu sendiri dalam pemilihan calon kepala daerah.

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat (ormas) Islam, yang memiliki jaringan anggota yang sangat luas dan tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan, seringkali menjadi sasaran bagi peserta pemilihan, terkhususnya pada pemilihan kepala daerah yang mana kekuatan politik dari organisasi Islam ini cukup menjanjikan setelah Nahdlatul Ulama (NU) yang menggambarkan representasi dari suara umat Islam.<sup>8</sup> Muhammadiyah sendiri tidak dilahirkan untuk organisasi politik atau partai politik, tetapi sebatas sebagai “gerakan politik” yang berkaitan dengan gerakan dakwah *amar makruf nahi munkar*. Politik yang digunakan Muhammadiyah di sini tidak pernah jauh dari rakyat, sehingga politik yang dikembangkan termasuk kepada politik yang selalu memperjuangkan rakyat dan berpihak pada nilai-nilai Islam.<sup>9</sup>

Selain itu, pandangan lainnya yang menyebutkan Muhammadiyah sebagai *interest group* menurut perspektif Gabriel Almond merupakan organisasi yang tidak berkehendak berebut kekuasaan publik secara langsung dalam peristiwa politik, seperti pemilu tetapi para elitnya tidak bisa berdiam diri dalam percaturan

---

<sup>8</sup>Ridho. A. 2019. Arah Politik Muhammadiyah Dalam Pilpres 2019. *Kalijaga Journal of Communication* 1(1).

<sup>9</sup>Al-Barbasy. M. M. 2017. Muhammadiyah dan Politik: Dilema Antara ‘Keep Close’ dan ‘Keep Distance’. *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan* 34(2).

politik setelah melakukan interpretasi terhadap situasi. Gerakan Muhammadiyah dalam bidang politik telah sesuai dengan Kittaahnya yaitu dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dalam arti dan proposisi yang sebenar-benarnya dimana Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis dan konseptual.<sup>10</sup> Namun pada kenyataannya perdebatan Muhammadiyah ikut dalam ranah politik dengan memberikan dukungannya pada Pilkada ini masih terdapat perbedaan dari masyarakat Muhammadiyah itu sendiri.

Muhammadiyah yang memberikan surat rekomendasi sebagai salah satu bentuk dukungannya kepada calon kepala daerah memperlihatkan Muhammadiyah sebagai suatu kelompok yang bisa mempengaruhi pemilih untuk memilih dalam pemilihan nantinya. Fenomena ini berkaitan dengan teori kelompok kepentingan (*interest group*) yang dikembangkan oleh Gabriel A. Almond yang menjelaskan bahwa kelompok kepentingan sendiri berusaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa mendapatkan jabatan politik secara langsung. Kelompok kepentingan memiliki banyak perbedaan dalam struktur, basis dukungan, pembiayaan, dan yang terpenting adalah sebagai penghubung antara pemerintah dan Masyarakat dalam sebuah sistem demokrasi. Kelompok kepentingan di sini biasanya berisikan kelompok-kelompok profesional, persatuan buruh, pedagang usaha, organisasi keagamaan serta

---

<sup>10</sup>J. Harsono. 2018. Analisis Sikap Politik Warga Muhammadiyah Ponogoro Dalam Pilkada 2015. *Jurnal Aristo (Sosial, Politik, Humaniora)* 6 (1) halaman 82

masih banyak kelompok kepentingan lainnya.<sup>11</sup> Begitu juga, Muhammadiyah yang di sini diartikan sebagai kelompok kepentingan yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi sebuah kebijakan pemerintahan serta memiliki peran penting untuk meyakinkan masyarakat, sehingga Muhammadiyah sendiri memiliki informasi tentang kebutuhan masyarakat yang berguna untuk para pasangan calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi dalam Pilkada tersebut.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tentunya merupakan aspek krusial dalam kehidupan bernegara Indonesia, terutama di era Reformasi. Pilkada menjadi wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi sesuai dengan sistem yang dianut di negara ini. Tujuan utama dari pelaksanaan Pilkada adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih secara langsung kepala daerah yang akan memimpin dan mewakili kepentingan masyarakat di daerah masing-masing.<sup>12</sup> Pilkada serentak Tahun 2024 di Sumatera Barat berlangsung serentak pada 27 November 2024 dengan total daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah sebanyak 20 daerah dengan rincian 1 provinsi, 12 kabupaten, dan 7 kota.<sup>13</sup> Dari 19 kabupaten/kota yang ada, Muhammadiyah hanya mengeluarkan 14 surat rekomendasi kepada calon kepala daerah yang hasil dari pemungutan suara itu 7 kepala daerah berhasil terpilih dan 7 lainnya gagal.

---

<sup>11</sup>Maiwan, Mohammad. 2016. "Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan Dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 15 (2) ; 75-91.

<sup>12</sup>Sutrisno, C. 2017. Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 2(2) 38-50

<sup>13</sup>dprd.sumbarprov.go.id. Ketua Sementara DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Berpartisipasi Aktif Dalam Pilkada, <https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/2417> Diakses pada 27 Januari 2025.

Penelitian mengenai keterlibatan organisasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah ini telah banyak dilakukan, seperti Ali Ridho Tahun 2019 yang berjudul “Arah Politik Muhammadiyah Dalam Pilpres 2019”<sup>14</sup>, Anindita Pratitaswari dan Sri Budi Eko Wardani Tahun 2020 “Fenomena Broker Politik dalam Penyelenggara Pemilu”<sup>15</sup>, Annai Saburi dan Atikah Asna Tahun 2023 “Perilaku Elit Muhammadiyah dalam Pemberdayaan Politik Masyarakat Kota Medan”<sup>16</sup>, Teguh Raharjo, Khorida AR, Yuri Febriyenti, dan Miftahul Jannah Tahun 2024 “Muhammadiyah dan Politik 2024”<sup>17</sup>, dan yang terakhir Rahmat Abdul Fatah Tahun 2024 “Rasionalitas Pemilih Muhammadiyah Menjelang Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2024”<sup>18</sup>. Para peneliti terdahulu pada umumnya berfokus kepada bagaimana arah atau haluan politik dari Muhammadiyah dan perilaku dari elit politik Muhammadiyah serta di sini lebih banyak membahas bentuk dari politik Muhammadiyah dalam mengikuti perkembangan politik di Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini berfokus menganalisis keterlibatan serta mengkaji bentuk dukungan yang diberikan Muhammadiyah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Provinsi Sumatera Barat.

---

<sup>14</sup>Ali Ridho. 2019. Arah Politik Muhammadiyah dalam Pilpres 2019. *Kalijaga Journal of Communication* 1(1)

<sup>15</sup>Aninditas Pratitaswari, Sri Budi Eko Wardani. 2020. Fenomena Broker Politik dalam Penyelenggara Pemilu. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19(2) 217-228

<sup>16</sup>Annai Saburi, Atikah Asna. 2023. Perilaku Elit Muhammadiyah dalam Pemberdayaan Politik Masyarakat Kota Medan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 11(1) 73-81

<sup>17</sup>Teguh Raharjo, Dkk. 2024. Muhammadiyah dan Politik 2024. *MASTERPIECE: Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 2(2) 99-109

<sup>18</sup>Rahmat Abdul Fatah. 2024. Rasionalitas Pemilih Muhammadiyah Menjelang Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2024. *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 10(1) 30-42

Perbedaan sudut pandang dan teori serta fokus kajian pada penelitian terdahulu menjadi *Novelty* atau keterbaharuan pada penelitian ini, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari sudut pandang mengenai keterlibatan Muhammadiyah memberikan 14 surat rekomendasi dan bentuk dukungan yang diberikan oleh Muhammadiyah kepada beberapa calon kepala daerah pada Pilkada 2024 di Sumatera Barat dengan menggunakan teori Kelompok Kepentingan dari Gabriel Almond, yang dianalisis menggunakan beberapa indikator pada teori tersebut sebagai pisau analisis. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mengangkat penelitian dengan judul “Keterlibatan Muhammadiyah dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa organisasi ini memiliki netralitas politik dalam pemilihan baik itu pemilu maupun Pilkada. Namun seiring berjalannya waktu Muhammadiyah mengeluarkan ijtihad politik yang diartikan di sini sebagai bentuk politik praktis yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk mendorong para kader-kader terbaiknya yang ikut dalam kontestasi pemilihan yang ada di Indonesia. Ijtihad politik Muhammadiyah merupakan fatwa yang secara struktural dan moral mengikat semua warga dan

kader Muhammadiyah, meskipun demikian ijtihad ini menghasilkan pro dan kontra sampai kepada internal dari Muhammadiyah itu sendiri.<sup>19</sup>

Walaupun Muhammadiyah dikenal sebagai ormas Islam, peran Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan (*interest group*) Menjadi sangat penting, yang mana Muhammadiyah di sini tidak bertransformasi menjadi sebuah partai politik, melainkan memilih jalur sebagai kelompok kepentingan yang juga ikut serta mempengaruhi kebijakan publik baik melalui advokasi, lobi, ataupun mendorong para kadernya di posisi strategis pemerintahan dan legislatif. Karena itulah ijtihad politik Muhammadiyah menunjukkan refleksi dari peran Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan yang memiliki kapasitas mobilisasi massa yang kuat, jaringan sosial yang luas, serta memiliki legitimasi moral yang di mata masyarakat.<sup>20</sup>

Bentuk dari ijtihad politik Muhammadiyah ini memberikan dukungan berupa surat rekomendasi yang diberikan kepada calon-calon tersebut, dengan rekomendasi ini bertujuan untuk mengarahkan warga Muhammadiyah agar memilih calon-calon yang didukung oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah menggunakan politik praktis yang digambarkan sebagai ijtihad politik mulai dari Tahun 2004 yang memberikan dukungannya kepada Amien Rais yang terlibat dalam pemilihan presiden pada Pemilu 2004, yang mana dukungan ini

---

<sup>19</sup>Happy Susanto. 2016. Muhammadiyah dan Politik (Analisa Pengalaman Politik pada Pilpres II Ponorogo Tahun 2004). *PROSIDING Seminar Nasional 2016*, 912-913

<sup>20</sup>Burhani, Ahmad Najib. 2013. "The Muhammadiyah's Attitude to Politics and the Issue of the Islamic State in Indonesia." *Studia Islamika*, 20 (1) hal 1-28.

berdasarkan alasan subjektif karena Amien Rais pernah menjadi ketua umum dan merupakan salah satu kader terbaik Muhammadiyah.<sup>21</sup> Sampai pada Pilkada serentak Tahun 2024 di Sumbar, ijhtihad politik yang digambarkan sebagai politik praktis Muhammadiyah masih terus ada dan masih tetap menjadi sebuah perdebatan baik internal Muhammadiyah maupun eksternal Muhammadiyah.

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 di Sumbar, dari 19 kabupaten/kota banyak menjadikan dukungan dari Muhammadiyah yang dikenal oleh masyarakat dan memiliki basis massa yang tersebar di seluruh Sumbar sebagai bentuk strategi untuk memenangkan kontestasi Pilkada serentak Tahun 2024 di Sumbar. Muhammadiyah yang memiliki basis massa yang sangat banyak di Sumbar, dengan itu menjadikan Muhammadiyah sebagai ladang untuk mendapatkan dukungan oleh para calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi pada Pilkada serentak Tahun 2024.

Pada Pilkada serentak Tahun 2024 ini Muhammadiyah banyak mendapatkan permintaan rekomendasi dari beberapa calon kepala daerah di Sumbar, salah satu bentuk surat rekomendasi yang diberikan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar kepada salah satu pasangan calon, seperti berikut:

---

<sup>21</sup>*Ibid.* 912

**Gambar 1.1**  
**Contoh Surat Rekomendasi Yang Diberikan Oleh PWM Sumbar**



Sumber: Data primer yang didapatkan peneliti dari Doli Saputra pada Tanggal 21 Juli 2025.

Surat rekomendasi yang diberikan oleh Muhammadiyah bukan hanya diberikan tanpa adanya pertimbangan dari Muhammadiyah. Surat rekomendasi yang diberikan Muhammadiyah kepada salah satu pasangan calon memiliki prosedur dan rapat berkala untuk menentukan siapa yang akan di dukung. Singkatnya dimulai dari adanya program yang dibentuk oleh LHKP PP Muhammadiyah diserahkan kepada wilayah-wilayah dan LHKP Wilayah mengundang seluruh PDM, PDA, serta cabang dan ranting. Setelah semua dirapatkan dan atas persetujuan bersama, barulah hasil dari rapat itu diserahkan kepada wilayah untuk mengeluarkan surat rekomendasi dalam bentuk forum dengan mengundang pasangan calon tersebut. Namun selain itu, ada contoh

kasus pada PDM Padang Pariaman yang hasilnya dari rapat di daerah tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Hal ini adanya miskomunikasi antara PWM dengan PDM dalam mengeluarkan keputusan surat rekomendasi ini.

**Gambar 1.2**  
**Contoh Surat Penolakan PDM Padang Pariaman Kepada PWM Sumbar Terkait Hal Surat Rekomendasi**



Sumber: Data primer yang didapatkan peneliti dari Doli Saputra pada Tanggal 21 Juli 2025.

Muhammadiyah mempunyai program tersendiri dalam memberikan surat rekomendasi kepada calon kepala daerah, bentuk program yang dibuat oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat (LHKP PP) Muhammadiyah yaitu “Satu Daerah Satu CakadaMu”. Program ini digagas oleh

LHKP untuk mendorong kader dan warga Muhammadiyah untuk terlibat langsung dalam politik praktis terutama maju sebagai calon kepala daerah.

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat (LHKP PP) Muhammadiyah ini lembaga yang langsung dikelola oleh Muhammadiyah sendiri untuk membidangi urusan isu-isu kebijakan publik dan advokasi politik kebangsaan tanpa melepaskan prinsip independensi dan netralitas Muhammadiyah. LHKP PP Muhammadiyah ini juga dilandasi dengan keputusan muktamar serta kebijakan teknis dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kajian politik, advokasi, lobi, sampai kepada rekomendasi kebijakan. Maka dari itu salah satu program yang dikeluarkan oleh LHKP PP Muhammadiyah tentang memberikan surat rekomendasi memiliki ketentuan dan kriteria Calon Kepala Daerah Muhammadiyah (CakadaMu) sebagai berikut:

1. Satu Daerah (baik Provinsi maupun kabupaten/kota) terdiri dari satu calon CakadaMu. Jika terdapat dua calon atau lebih, LHKP dan PWM/PDM hendaknya bermusyawarah dan mengambil keputusan terbaik untuk Persyarikatan setelah dilakukan survei/riset.
2. Calon pernah/sedang aktif di Persyarikatan Muhammadiyah termasuk Organisasi Otonom (Ortom). Jika tidak ada, mereka merupakan mandat dari Muhammadiyah setempat dan memiliki komitmen kuat dengan persyarikatan.

3. Calon memiliki integritas dan komitmen kuat dengan Muhammadiyah untuk memperjuangkan kepentingan dan agenda-agenda Muhammadiyah.
4. Calon memiliki kecakapan dan kapasitas dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan.
5. Calon memiliki elektabilitas dan potensi kuat untuk terpilih tersebut sehingga calon adalah pribadi yang diterima oleh masyarakat di Dapilnya dan mudah untuk dipilih.<sup>22</sup>

Dari 5 bentuk ketentuan dan kriteria yang diberikan oleh LHKP PP Muhammadiyah, setelah melalui beberapa tahapan proses dalam menentukan “CakadaMu” Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar telah memberikan 14 surat rekomendasi kepada “CakadaMu” dari 14 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, berikut data pasangan calon kepala daerahnya:

**Tabel 1.1**  
**Daftar Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumbar Oleh Muhammadiyah**

No.	Nama Pasangan Calon	Kabupaten/Kota	Hasil
1	Benny Dwifa Yuswir dan Iraddatillah	Kabupaten Sinjungjung	Terpilih
2	Eka Putra dan Ahmad Fadly	Kabupaten Tanah Datar	Terpilih
3	Guspardi Gaus dan Yogi Yolanda	Kabupaten Agam	Tidak Terpilih
4	Mara Ondak dan Desrizal	Kabupaten Pasaman	Tidak Terpilih
5	Hendri Septa dan Hidayat	Kota Padang	Tidak Terpilih
6	Genius Umar dan M. Ridwan	Kota Pariaman	Tidak Terpilih
7	Ramadhani Kirana Putra dan Suryadi Nurdal	Kota Solok	Terpilih
8	Yulianto dan Iphan	Kabupaten Pasaman Barat	Terpilih
9	Nasrul Naga dan Eri	Kota Padang Panjang	Tidak Terpilih

<sup>22</sup>LHKP PP Muhammadiyah. 2024. Strategi Muhammadiyah dalam Menghadapi Pilkada dan Pilkades. *Draft Rumusan*

10	M. Ramlan Nurmatias dan Ibnu Asis	Kota Bukittinggi	Terpilih
11	Almaysar dan Joni Hendri	Kota Payakumbuh	Tidak Terpilih
12	Hendrajoni dan Risnaldi Ibrahim	Kabupaten Pesisir Selatan	Terpilih
13	Deni Asra dan Riko Febrianto	Kabupaten Limapuluh Kota	Tidak Terpilih
14	Annisa dan Leli Resmi	Kabupaten Dharmasraya	Terpilih

*Sumber: Data Olahan Peneliti 2025.*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya terdapat rekomendasi yang bentuk dukungan yang diberikan oleh Muhammadiyah kepada pasangan calon kepala daerah pada Pilkada serentak Tahun 2024 di Sumbar. Hal ini menunjukkan bentuk nyata ijtihad politik Muhammadiyah atau politik praktis yang dilakukan oleh Muhammadiyah, meskipun menjelang Pilkada masih banyaknya perdebatan mengenai politik praktis yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini.

Muhammadiyah memberikan rekomendasi kepada “CakadaMu” pada setiap pasangan calon tentunya memiliki faktor serta alasan untuk mendukung pasangan calon tersebut. Salah satu contohnya seperti Muhammadiyah Agam yang mendukung Guspari Gaus dan Yogi Yolanda di Pilbup Agam 2024. Dikutip dari berita Langgam.id, Hal ini ditegaskan oleh Ketua PDM Agam, Mursyidi:

“Setelah melalui proses seleksi dari empat pasangan calon, kami memilih Guspari dan Yogi karena keduanya adalah kader Muhammadiyah yang memiliki perjalanan panjang dalam organisasi ini. Kombinasi pengalaman Guspari dan semangat muda Yogi menjadi kekuatan yang membuat kami yakin mampu membawa regenerasi dan perubahan nyata bagi Agam.”<sup>23</sup>

<sup>23</sup>Dikutip Dari Langgam.id. Admin Palanta. 2024. Muhammadiyah Agam Dukung Guspari Gaus dan Yogi Yolanda di Pilbup Agam 2024, <https://langgam.id/Muhammadiyah-agam-dukung-guspari-gaus-dan-yogi-yolanda-di-pilbup-agam-2024/> Diakses pada 29 Januari 2025

Dari kutipan berita di atas, Muhammadiyah melakukan proses seleksi dan pastinya melalui pertimbangan yang matang oleh tokoh – tokoh Muhammadiyah Kabupaten Agam yang bertekad mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Agam, Guspari Gaus dan Yogi Yolanda dalam Pilkada Agam 2024.

Sejalan dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya, hal ini juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Sadri Chaniago selaku akademisi Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas, yang menyatakan bahwa formula kebijakan yang dikeluarkan oleh PWM Sumbar melalui LHKP PP Muhammadiyah mengenai program “CakadaMu” ini belum adanya penjelasannya atau jawaban dari bagaimana bentuk indikator dan dasar pertimbangan yang jelas dalam memberikan rekomendasi kepada calon kepala daerah yang akan di dukung oleh warga Muhammadiyah sendiri.<sup>24</sup>

Dari data di atas, peneliti beramsusi bahwa adanya tendensi Muhammadiyah untuk memenuhi kepentingannya sebagai bentuk keterlibatan pada Pilkada serentak Tahun 2024 di Sumbar, hal ini dapat dilihat dari rekomendasi yang diberikan kepada beberapa kandidat Pilkada dalam pemberian rekomendasi yang tidak sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh LHKP PP Muhammadiyah dalam program CakadaMu. Hal ini juga memperkuat asumsi peneliti, bahwa Muhammadiyah tidak hanya sekedar merekomendasikan tetapi juga memiliki kepentingan sehingga ada beberapa calon yang tidak sesuai dengan kriteria dan ketentuan dari program CakadaMu

---

<sup>24</sup>Sadri Chaniago. 2024. Rekomendasi Muhammadiyah untuk Kandidat di Pilkada. *Padang Ekspres*.

itu sendiri. didasarkan pada ketentuan dan kriteria yang di rumuskan oleh LHKP PP Muhammadiyah. Peneliti melihat adanya strategi Muhammadiyah dalam politik praktis ini, untuk menaikkan eksistensi sebagai organisasi masyarakat Islam melalui pemberian dukungan surat rekomendasi kepada calon kepala daerah.

Oleh karena itu, peneliti merumuskan permasalahan tersebut dalam suatu rumusan masalah, yaitu Bagaimana keterlibatan Muhammadiyah pada Pilkada serentak Tahun 2024 di Sumatera Barat dan bentuk dukungan yang diberikan Muhammadiyah kepada pasangan calon yang didukung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan bentuk keterlibatan Muhammadiyah dalam Pilkada serentak Tahun 2024 di Sumatera Barat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini baik manfaat secara akademis maupun praktis yang dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.

#### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan akan menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan

ilmu pengetahuan khususnya tentang keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia pada Pilkada.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru dan bermanfaat bagi pihak tertentu khususnya bagi organisasi masyarakat yang terlibat dalam Pilkada, seperti keterlibatan Muhammadiyah dalam Pilkada Sumbar serta bentuk dukungan yang diberikan.

